



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI II DPR RI

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 25 Agustus 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Acara	: 1. Progress penetapan NIP CPNS dan PPPK tahun 2024 2. Mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu 3. Proses Penyusunan RPP Manajemen ASN
Ketua Rapat	: Aria Bima/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Fahmi Asy'ari, S.Sos./Plh. Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 14 (empat belas) dari 42 (empat puluh dua) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB C. Kepala BKN

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB dan Kepala BKN, dengan agenda progress penetapan NIP CPNS dan PPPK tahun 2024, Mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu, dan proses penyusunan RPP Manajemen ASN, hari Senin, 25 Agustus 2024, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Progress Penetapan NIP CPNS dan PPPK Tahun 2024

- Formasi CPNS Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 248.721 formasi dengan pelamar mencapai 3,57 juta orang. Dari jumlah tersebut,

180.447 pelamar dinyatakan lulus. Hingga 22 Agustus 2025, telah terbit 176.742 Pertek NIP (99%) dan 176.220 SK NIP (99,7%).

- Formasi PPPK Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 1.008.337 formasi dengan 1,39 juta pelamar.
 - Tahap I: 690.134 lulus (87% keterisian), 590.075 Pertek, 517.381 SK.
 - Tahap II: 185.800 lulus, 28.949 Pertek, dan 2.451 SK (8,47%).
- Masih terdapat permasalahan berupa keterisian formasi yang belum optimal, pengunduran diri pasca-optimalisasi sebanyak 5.455 peserta, serta keterlambatan instansi dalam finalisasi hasil seleksi.

2. Mekanisme Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

- Berdasarkan KepmenPANRB No. 15 dan 16 Tahun 2025 serta Surat MenPANRB B/3832 dan B/4014 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebagai skema penataan Non-ASN.
- Tujuan kebijakan ini adalah:
 1. Menyelesaikan penataan pegawai Non-ASN sesuai amanat UU ASN,
 2. Memberikan kepastian status hukum,
 3. Memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah, dan
 4. Mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas.
- Jabatan yang dapat diangkat paruh waktu mencakup guru, tenaga kesehatan, serta jabatan teknis operasional.
- Proses: usulan formasi → penetapan kebutuhan oleh MenPANRB → penerbitan NI PPPK oleh BKN → pengangkatan melalui SK PPK instansi.
- Upah diberikan minimal setara gaji Non-ASN sebelumnya atau UMR, dengan sumber anggaran dari instansi pemerintah/APBD, bahkan dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).
- Progress per 22 Agustus 2025 menunjukkan dari potensi 1,37 juta pegawai, sebanyak 1,07 juta (78%) sudah diusulkan, 66 ribu (4,9%) ditolak, dan 235 ribu (17,2%) belum diusulkan.

3. Progress Penyusunan RPP Manajemen ASN

- UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan penyusunan RPP Manajemen ASN untuk mengatur 22 substansi utama, termasuk kode etik, jabatan ASN, mekanisme PPPK, pengisian jabatan TNI/Polri, hak dan kewajiban, kinerja, talenta, pengembangan kompetensi, hingga digitalisasi manajemen ASN.
- Proses penyusunan:
 - Izin prakarsa Presiden disetujui 5 Februari 2024.
 - Pembahasan PAK berlangsung Februari–Agustus 2024.

- Harmonisasi dan klarifikasi lintas kementerian dilaksanakan sepanjang 2025.
- Pada 15 Agustus 2025, draf RPP telah diparaf oleh Menteri PANRB, Mendagri, dan Menkeu, dan saat ini menunggu penetapan Presiden.
- Tantangan: kompleksitas substansi (22 mandat), keterlibatan lintas sektoral, serta kebutuhan simulasi dan mitigasi risiko implementasi.

III. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB dan Kepala BKN, dengan agenda progress penetapan NIP CPNS dan PPPK tahun 2024, Mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu, dan proses penyusunan RPP Manajemen ASN, memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas progres pengadaan CASN 2024, yang menunjukkan keterisian formasi cukup tinggi. Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan afirmasi bagi Non-ASN, termasuk skema PPPK Paruh Waktu (KepmenPANRB No. 16/2025) sebagai solusi untuk menuntaskan penataan Non-ASN sesuai amanat UU ASN.
2. Komisi II DPR RI merekomendasikan agar Kementerian PANRB dan BKN segera menyelesaikan formasi PPPK melalui optimalisasi sesuai urutan prioritas.
3. Pemerintah perlu meningkatkan akurasi dan integritas administrasi seleksi dengan mewajibkan pendaftaran mandiri peserta dan memperkuat literasi digital agar tidak ada kasus Memenuhi Syarat (MS) ke Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang menghambat proses seleksi.
4. Komisi II DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penempatan agar lebih memperhatikan domisili, kebutuhan keluarga, serta kesiapan daerah. Insentif khusus perlu diberikan bagi formasi di daerah 3T untuk mencegah gelombang pengunduran diri PPPK.
5. Komisi II DPR RI mendorong KemenpanRB dan BKN melakukan pengawasan kepada PPK agar melakukan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan skema kebijakan yang sudah ditetapkan.
6. Komisi II DPR RI menekankan agar RPP Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden. Regulasi ini sangat penting sebagai payung

hukum tata kelola ASN, termasuk pengisian jabatan, sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi ASN sesuai amanat UU 20/2023.

7. Komisi II DPR RI meminta kepada Deputi Bidang SDMA dan Kepala BKN untuk memberikan jawaban tertulis yang belum dijawab paling lambat 7 (tujuh) hari setelah RDP hari ini selesai.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.14 WIB.

JAKARTA, 25 AGUSTUS 2025
KETUA RAPAT

-ttd-

ARIA BIMA
A-200